

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Muhammadiyah dan politik, merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Muhammadiyah dalam proses kelahirannya, berkaitan dengan dinamika politik yang melatarbelakangi saat itu, dan dakwah sebagai corongnya, senantiasa bersentuhan dengan realita politik dalam syiar nilai-nilai Islam yang disampaikan dan diperjuangkannya.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, kontribusi Muhammadiyah dalam perpolitikan di Indonesia tidak terlepas dari perilaku politik elitnya di dalam ikut serta memainkan peranan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkemajuan. Para elite politik adalah “pemilik” status sosial yang memiliki modal sosial tinggi yang mampu membangun pengaruh di masyarakat. Tingginya status sosial dan perannya di masyarakat mampu membangun pengaruh yang besar di dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Kontekstualisasinya dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kabupaten Temanggung yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013, tampaknya memberikan proses pembelajaran politik yang berharga bagi masyarakat Temanggung dan Indonesia pada umumnya, karena tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kesadaran politik yang ditumbuhkan oleh para elite politik dan partai politiknya berhasil dilakukan. Dari sini dapat digarisbawahi, bahwa keterlibatan masyarakat dalam Pemilukada di kabupaten Temanggung

memberikan azas manfaat ke depan bahwa mereka memang dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di manapun berada, tentu menarik untuk dikritisi dari berbagai sudut pandang (*perspective*). Dipilihnya kabupaten Temanggung pada penelitian ini karena beberapa alasan berikut. Pertama, pemilihan kepala daerah diikuti oleh lima kontestan calon pemimpin daerah. Partisipasi rakyat terhadap proses pergantian kepala daerah sangat tinggi karena suatu dorongan bersama agar Temanggung menjadi kabupaten yang lebih baik lagi dan maju. Jumlah kontestan dalam suatu pemilihan kepala daerah menentukan seberapa besar animo, sikap politik dan respon warga terhadap dinamika demokrasi di kabupaten Temanggung.

Kedua, di wilayah Kauman Temanggung yakni Kauman Selatan sekitar masjid dan Kauman utara di wilayah Suronatan, khususnya di dua Tempat Pemungutan Suara yakni TPS 4 dan TPS 6, memperoleh suara tertinggi, padahal warga Muhammadiyah bukanlah mayoritas. Tetapi fakta lapangan menunjukkan bahwa di kedua lokasi tersebut memperoleh suara tertinggi.

Ketiga, sebagai salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah, kabupaten Temanggung memiliki kekayaan pertanian, seperti hasil bumi tembakau, kopi, padi dan cengkeh yang berlimpah oleh karena didukung susana dan kondisi daerah yang sejuk dan tercukupi panas matahari dan air bersih. Dari sini dapat diketahui betapa besar perputaran ekonomi di wilayah kabupaten Temanggung khususnya hasil bumi tembakau sebagai salah satu pemasok terbesar di Jawa pada pabrik-pabrik rokok, seperti Gudang Garam yang memiliki gudang besar di wilayah tersebut,

yakni di jalur ekonomi kota menuju kecamatan (jalur kota Temanggung melewati wilayah Bulu yang menghubungkan dengan kota kecamatan Parakan). Tak dapat dipungkiri, bahwa kekayaan melimpah kabupaten Temanggung “memancing” banyak pihak untuk mencoba “mengelola” kekuatan aset itu.

Keempat, PAN yang merupakan wadah aspirasi politik sekaligus kendaran politik calon bupati dari warga Muhammadiyah, memiliki tujuh kursi di DPRD dan itu sama dengan PDI-P. Sementara partai lain harus berkoalisi karena tidak terpenuhinya jumlah kursi di perwakilan mereka.

Berikutnya, alasan mendasar yang menjadi pilihan subyek penelitiannya adalah elite politik Muhammadiyah, karena perilaku politik elite Muhammadiyah memiliki keterkaitan dengan kesadaran dan tujuan politik dari elite politik sebagai aktor yang memainkan politik, juga merupakan hasil dari pertemuan faktor-faktor struktur-struktur kepribadian, keyakinan politik, tindakan politik individu dan struktur serta proses politik yang menyeluruh. Sedangkan variabel yang mendukung perilaku politik yakni variabel personal seperti pengalaman-pengalaman individual, warisan-warisan genetik, persepsi, motivasi, tujuan, sikap, ketrampilan dan pengetahuannya serta variabel situasional terdiri atas keyakinan-keyakinan budaya termasuk nilai dan norma, struktur-struktur sosial, faktor-faktor geografis dan kemampuan teknologis (Charles F. Andrain, 1992, 54).

Kontekstualisasinya dengan *world view* orientasi politik elite politik Muhammadiyah, ditentukan juga oleh keterlibatannya dalam organisasi atau institusi sosial. Dalam hal ini, perilaku politik dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, kelas sosial, agama dan

ideologi, tetapi juga perilaku politik dapat dipengaruhi oleh *variable* berikut: 1) *kekuasaan*, sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, 2) *kepentingan*, tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik, dan 3) *kebijaksanaan*, hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan, dan keempat, budaya politik-orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik (Miriam Budiardjo, 2000, 49).

Penelitian ini memfokuskan pada kajian Politik Islam yang menelaah tentang perilaku politik elite Muhammadiyah di wilayah Kauman kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa di beberapa wilayah di Indonesia, Kauman merupakan wilayah yang dihuni oleh mayoritas warga Muhammadiyah atau biasa disebut “kampung Muhammadiyah”, sehingga bisa pula diklaim bahwa asal ada Kauman, “pasti” mayoritas Muhammadiyah.

Namun tidak demikian halnya dengan Kauman Temanggung yang ternyata dihuni oleh mayoritas warga non Muhammadiyah. Jumlah warga Muhammadiyah masih di bawah jumlah mayoritas mereka, meskipun tidak begitu signifikan. Kauman dibagi menjadi dua wilayah, yakni Kauman Selatan adalah wilayah disekitar masjid Agung Temanggung, dan Kauman Utara adalah wilayah seberang jalan utara masjid. Hasil observasi menunjukkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Kauman Selatan dan Kauman Utara, di dua tempat tersebut, yakni TPS 4 memperoleh suara 38,7 %, dan TPS 6 memperoleh suara 81,3 %.

Melihat dan memahami konstalasi politik di daerah Temanggung, tentu menjadi suatu perhatian dan telaah menarik untuk dikaji. Problematika penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, di beberapa titik TPS calon bupati yang diusung Muhammadiyah melalui kendaraan politik PAN menempati urutan teratas di TPS-TPS, khususnya yang menjadi ukuran adalah Kauman Temanggung. Kedua, PAN memiliki tujuh kursi di DPRD dan itu jumlah yang sama dengan yang dimiliki oleh PDI-P. Adapun partai-partai lain seperti PPP, PKNU, Demokrat, Golkar, Gerindra, dan Hanura terpaksa harus berkoalisi karena tidak terpenuhinya jumlah kursi di DPRD. Maka berhadapan-hadapanlah antara PAN dan PDI-P, meski akhirnya kalah dengan calon yang diusung PDI-P, yakni Bambang Sukarno. Ketiga, salah satu penyebab kekalahan calon dari PAN yang merupakan kader Muhammadiyah, diindikasikan oleh karena “kesalahan” dalam pemilihan atau penentuan wakil bupati yang mendampingi calon bupati Anif Punto utomo, yang membuat perilaku pemilih dari warga Muhammadiyah “berpikir ulang” memilihnya.

Konteksnya dengan penelitian ini, penting dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadikan calon bupati yang diusung Muhammadiyah melalui kendaraan politik PAN memperoleh suara tertinggi di wilayah Kauman. Termasuk juga yang berkaitan dengan pilihan rasional pemilih.

Memahami konteks persoalan di atas, terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Temanggung Jawa Tengah pada tanggal 26 Mei 2013 untuk masa pemerintahan 2013-2018, yang juga dilakukan serentak dengan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2013 sangat menarik untuk dilakukan kajian mendalam. Para kontestan dari berbagai partai politik tidak sekadar menjadi calon tetapi juga ikut serta menjaga stabilitas keamanan

dan kenyamanan masyarakat Temanggung khususnya. Bahkan yang jauh lebih menarik adalah tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni 82,89% lebih tinggi dari tahun sebelumnya 80,18%, bahkan juga partisipasi ini diklaim tertinggi di pulau Jawa.<sup>1</sup> Penting untuk diketahui bahwa jumlah penduduk kabupaten Temanggung tahun 2013 mencapai 739.873 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,88 persen (Data Statda Badan Pusat Statistik kabupaten Temanggung).

Penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana perilaku politik elite Muhammadiyah pada Pemilu kabupaten Temanggung tahun 2013, khususnya perolehan suara tertinggi calon bupati dari Muhammadiyah di wilayah Kauman. Penelitian ini mencoba mengamati mengenai kehidupan politik masyarakat Temanggung khususnya elite politik Muhammadiyah di wilayah Kauman Temanggung (Selatan, lingkungan masjid dan Utara, daerah Suronatan), mengenai perilaku politik dan pergerakan sosial-politik di Temanggung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kajian ini dimaksudkan memberikan perhatian dan analisis mendalam tentang perilaku politik elite Muhammadiyah di wilayah kabupaten Temanggung yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta memberikan pengaruh terhadap proses pemilihan kepala daerah kabupaten Temanggung Jawa Tengah tahun 2013. Melalui proses pengumpulan data dari berbagai sumber terkait, kajian ini berikhtiar menjawab pertanyaan, Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi atau menjadikan calon bupati dari Muhammadiyah memperoleh suara tertinggi di wilayah

---

<sup>1</sup><http://krjogja.com/read/174911/bambang-irawan-menang-pilkada-temanggung.kr>.

Kauman Temanggung? Inilah persoalan yang peneliti anggap problematik untuk dikaji secara mendalam melalui penelitian ini.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Mendeskripsikan dinamika politik dan menjelaskan perilaku politik elite Muhammadiyah pada Pemilu kabupaten Temanggung tahun 2013.

#### **1.3.2 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadikan calon bupati dari Muhammadiyah yang diusung PAN memperoleh suara tertinggi di wilayah Kauman Temanggung Selatan dan Utara.**

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memahami dinamika mengenai perilaku politik elite Muhammadiyah pada pemilu kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadikan calon bupati dari Muhammadiyah yang diusung PAN memperoleh suara tertinggi di wilayah Kauman Temanggung.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Mengidentifikasi perilaku politik elite Muhammadiyah yang mempengaruhi kehidupan politik bagi warga Muhammadiyah di wilayah kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi calon bupati dari Muhammadiyah memperoleh suara tertinggi di Kauman.

Selain penjelasan di atas, kajian ini dilakukan untuk mengembangkan kajian politik Islam kontekstualisasinya dengan sumber-sumber kekuasaan, dan hubungan timbal balik nilai-nilai oleh elite politik Muhammadiyah kaitannya dengan nilai-nilai organisasi keagamaan sebagai sebuah institusi serta mengembangkan berbagai bahasan tentang teori-teori perilaku politik. Kontekstualisasinya dengan perilaku politik dapat dilihat dari pemanfaatan peluang-peluang dan momentum era keterbukaan serta partisipasi politik di era transisi dan multi partai.

### **1.5 Review Pustaka**

Kajian tentang perilaku politik telah dilakukan oleh beberapa ilmuan yang mengambil *setting* wilayah di beberapa organisasi dan organisasi keagamaan maupun lokasi yang dianggap mampu memberikan informasi baik bagi perkembangan keilmuan politik dewasa ini. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama, penelitian Syarifuddin Jurdi yang menelaah tentang *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia (1966-2006)*. Penelitian dalam bentuk disertasi ini menjelaskan tentang dinamika politik Muhammadiyah terhadap perubahan politik Indonesia, baik itu menyangkut sistem politik, struktur politik dan budaya politik. Penelitian ini menunjukkan varian yang berbeda, menurut Syarifuddin Jurdi terkadang Muhammadiyah berhasil menjaga sikap netralnya terhadap politik tetapi juga berada dalam kooptasi dan hegemoni kekuatan politik. Sikap netralnya terhadap politik, diterapkan untuk menjaga independensi gerakan serta menghilangkan kesan telah terkooptasi oleh partai politik. Namun dalam perkembangannya, sikap netral politik dalam sistem otoriter Orde Baru tidak sepenuhnya dapat diterapkan, mengingat dominasinya elite-elite Muhammadiyah yang bekerja sebagai PNS



di bawah kooptasi dan hegemoni rejim Orde Baru, secara *de facto* berafilisasi ke Golkar, kekuatan politik rejim berkuasa (Syarifuddin Jurdi, 2000).

Tampaknya, ada situasi “mulur mungkret” ketika menghadapi situasi dan kondisi politik era rejim Orde Baru yang menggurita dan cenderung membelenggu secara hegemonik. Hal itu dapat di saksikan ketika Jurdi menganalisis bahwa tarik-menarik kepentingan antara faksi-faksi politik yang telah terbentuk sejak awal dekade tahun 1990 semakin kuat, bahkan prinsip dakwah amar ma`ruf nahi munkar menjadi semakin cair ketika dihadapkan pada kekuatan ekonomi politik. Sementara proses penghimpitan dengan partai politik ditandai oleh dua orientasi yakni mereka yang cenderung memandang politik secara legal formal (kelompok purifikan) menghimpitkan Muhammadiyah dengan partai ideologis Islam dan mereka yang lebih pluralis memilih afiliasi politik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Bagi Syarifuddin Jurdi, dinamika politik Muhammadiyah dalam periode yang diteliti mengindikasikan dua kecenderungan yakni, pertama pada rejim otoriter Orde Baru, Muhammadiyah berhasil mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik pemerintah, karena kuatnya afiliasi kepentingan politik Muhammadiyah dengan rejim berkuasa. Kedua, pada era transisi demokrasi pasca Orde Baru, Muhammadiyah mengalami kendala-kendala sosio-politik dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dan bahkan terkesan kurang tegas dan tidak berdaya menghadapi oligarki politik. Pada periode ini upaya menghimpitkan Muhammadiyah dengan politik berlangsung dalam ragam bentuk, ini menegaskan kegamangan Muhammadiyah menghadapi perubahan politik bangsa (*Ibid*).

Pandangan di atas, jelas memperlihatkan bagaimana perilaku politik Muhammadiyah ketika berhadapan dengan problematika politik pada situasi perubahan politik, ternyata menurut Syarifuddin Jurdi, mengalami kegamangan dalam bersikap dan memposisikan dirinya dalam masyarakat politik. Meski diakui akhirnya mampu mempengaruhi elemen pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan tetapi proses perjalanan panjang itu telah diwarnai situasi tidak menentu dalam menyikapi hal tersebut.

Kedua, penelitian Alfian tentang *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, yang menjelaskan tentang pembaharuan keislaman, bahwa Muhammadiyah telah memberikan kontribusi besar bagi perilaku politik Islam di Indonesia. Terutama berkaitan dengan pemahaman agama yang berikhtiar membebaskan masyarakat dari *taqlid* buta dan terbelenggu kepada mazhab tertentu telah membawa Muhammadiyah sebagai gerakan yang rasional-religius dalam membangun ideologi politik Islam di Indonesia. Implikasi tersebut dapat dilihat dalam gerakan sosial, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Alfian, 1989, 341-346). Penelitian ini fokus pada sejarah Muhammadiyah masa Penjajahan Belanda, ideologi Muhammadiyah dan perilaku politik dalam pengertian artikulatif.

Ketiga, penelitian David Efendi tentang *Politik Elite Muhammadiyah: Studi tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah*, Kajian ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai politik elite Muhammadiyah serta memahami bagaimana implikasinya terhadap dinamika internal organisasi dan eksternal politik Indonesia dalam panggung politik di negeri ini,

khususnya dalam pentas Pemilu 2009. Kegagalan politik tahun 2004 tidak menjadikan elite Muhammadiyah trauma untuk melakukan manuver dalam Pemilu 2009, meski memunculkan kubu anti politik praktis yang menguat pasca kekalahan Muhammad Amien Rais (David Efendi, 2014, 1-3). Beberapa argumen tentang signifikansi studi ini dilakukan antara lain, *pertama*, banyak pertanyaan mendasar yang betul-betul mengganggu mengenai optimisme kelompok *civil society* untuk membangun demokrasi. Akan tetapi, kelompok-kelompok CSO (*Civil Society Organization*) seperti NU dan Muhammadiyah selalu kandas, dalam mengusung kandidat dalam kontes pemilu langsung, untuk membentuk rezim yang 'lebih baik'. Apakah memang elit-elitnya sudah kehilangan karisma, atau mesin ormas ini nyaris lumpuh diterjang badai liberalisme politik yang didorong oleh partai politik, tim sukses dan tentu pemodal yang berkuasa dibalik kisah-kisah dramatis demokrasi elektoral. Atau apakah fragmentasi politik kelompok santri ini semakin membingungkan basis massanya? Ini merupakan beberapa pertanyaan kunci dalam studi ini (*Ibid*).

Berikutnya, dalam arena politik Pemilu 2009, David Efendi melihat betapa kuat fragmentasi itu terlihat di tubuh elite baik antar elite Muhammadiyah lama versus baru pasca Muktamar 2005, atau antara elite yang mengklaim Muhammadiyah murni, ideologis, puritan, versus Muhammadiyah yang pro politik praktis atau *high politic*, dengan berbagai penafsiran yang melegitimasi tindakan para elite. Ini merupakan sumbangan penting dalam kajian elite, mengingat kajian elite kepemimpinan dalam ormas masih jarang dilakukan, dibanding kajian terkait elite politik dalam artian elite yang memerintah (*Ibid*).

Keempat, penelitian Sidik Jatmika yang menelaah tentang *Kiai dan Politik Lokal: Studi Kasus Reposisi Politik Kiai NU Kebumen, Jawa Tengah Memanfaatkan Peluang Keterbukaan Partisipasi di Era Reformasi* (Sidik Jatmiko, 2005). Penelitian Sidik Jatmika mencoba mengurai persoalan bahwa kiai yang memiliki akses kekuasaan politik dan terjun langsung ke gelanggang politik praktis bahkan kemudian mencapai posisi strategis dalam politik lokal. Kiai dinyatakan memiliki akses politik apabila menjadi: 1) pemimpin politik (*elective political leader*); 2) pengurus partai politik; dan 3) kelompok kepentingan (*interest group*). Penelitian ini memfokuskan pada tiga tipologi kiai, yaitu kiai Tarekat, kiai Pesantren, dan kiai Langgar.

Penelitian Sidik Jatmiko melihat, bahwa perluasan posisi kiai berlangsung melalui sumber kewibawaan dan sarana yang mereka adopsi dari berbagai jargon dan praktik gerakan demokrasi di tingkat nasional yang diselaraskan dengan kondisi lokal. Hasil penelitian ini adalah bahwa kiai tidak menjadikan pertimbangan ideologi dalam melakukan negosiasi dan koalisi. Kiai lebih suka menggunakan mekanisme non-kepartaian dalam melakukan mobilisasi dan tawar menawar politik. Mereka juga bersikap hati-hati dan luwes, serta memilih jalan tengah. Cara itu menurut hasil penelitian Sidik Jatmika mengacu kepada pencapaian *maslahat* yakni keuntungan dan kebaikan serta menjauhi *mafsadah* yakni kerusakan dan kerugian. Meski demikian, dampak negatif juga ditimbulkan oleh sikap politik yang mereka lakukan, seperti perpecahan dalam keluarga besar (*zurriyah*) kiai; perpecahan antar kiai; perpecahan antar kiai dengan pengikutnya; perpecahan antar pengikut NU dan tersendatnya kinerja organisasi Nahdlatul Ulama serta manipulasi fiqih dan Islam itu sendiri (*Ibid*). Kontekstualisasinya dengan penelitian ini, adalah melihat dari sisi

modal sosial yang dimiliki elite NU di wilayah tersebut guna menggerakkan jamaah.

Hal penting yang perlu dicatat kaitannya dengan penelitian ini, bahwa jenis penelitian ini mencoba memahami tindakan politik seseorang atau kelompok warga masyarakat, ilmuan politik harus mengetahui perilaku sosial (politik) orang itu pada umumnya. Hal itu yang mengharuskan ilmu politik untuk meminjam konsep-konsep dan kerangka analisa yang dikembangkan ilmu sosiologi (Mohtar Mas`oed dan Nasikun, 1995, 2-20).

Kelima, penelitian Saiful Mujani berjudul *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*, merupakan karya disertasi yang menegaskan bahwa salah satu kecenderungan utama pasca-Perang Dingin adalah meningkatnya jumlah pemerintahan yang demokratis atau pemerintahan yang menerapkan nilai-nilai demokratis di seluruh dunia. Uniknya, hal ini tidak terjadi di Negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Menurut *Index of Political Right and Civil Liberty* yang dikeluarkan oleh Freedom House sepanjang tiga dekade terakhir, Negara-negara Muslim pada umumnya gagal membangun politik yang demokratis. Dalam periode tersebut, catat Saiful Mujani dari beberapa literatur hasil kajian, hanya ada satu Negara Muslim yang mampu membangun demokrasi secara penuh selama lebih dari lima tahun, yaitu Mali di Afrika. Dua belas Negara Muslim lainnya termasuk ke dalam kelompok semi-demokratis. Sisanya, yakni 35 negara bersifat otoritarian. Lebih dari itu, delapan dari 13 negara dengan pemerintahan paling represif di Dunia pada dekade yang lalu adalah Negara-negara Muslim (Saiful Mujani, 2007, 1). Ini temuan penting, catatnya.

Kajian Saiful Mujani, menemukan bahwa Islam yang didefinisikan sebagai dua satuan ibadah, yakni ibadah wajib dan ibadah sunnah, jaringan keterlibatan kewargaan Islam, identitas sosial Islam, dan orientasi politik Islamis (Islamisme) tidak memiliki hubungan negatif yang berarti dengan unsur-unsur demokrasi. Satu-satunya hubungan negatif yang signifikan ditemukan pada satu dimensi Islam, yakni Islamisme dan toleransi kepada kaum Kristen. Namun demikian, Islamis yang intoleran bukanlah ancaman nyata terhadap stabilitas demokrasi, karena kalangan Islamis yang intoleran cenderung merupakan partisipan politik yang pasif, bukan aktif. Tidak ada kaitan antara Islamisme yang intoleran dan aktifitas protes yang berpotensi menjadi faktor yang mendestabilisasi sistem demokrasi (*Ibid*).

Sebaliknya, hampir semua unsur Islam memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan keterlibatan kewargaan yang bersifat sekular (*secular civic engagement*), dengan keterlibatan politik, dan dengan partisipasi politik. Ketiga unsur demokrasi ini memperkuat dukungan kepada sistem demokrasi secara keseluruhan. Karena itu, Islam mendorong warga Negara Muslim terlibat aktif dalam politik dan aktifitas ini sejalan dengan sistem demokrasi secara keseluruhan. Yang muncul kemudian bukanlah kaum muslim taat yang menentang demokrasi, atau demokrat yang non-religius, melainkan kaum muslim religius yang menopang semakin kuatnya sistem demokrasi. Mereka itulah kaum muslim moderat (Azyumardi Azra, 1996, 1-23).

Menurut Abdul Munir Mul Khan sebagaimana dikutip oleh Faizin Karimi, bahwa perilaku dan gerakan politik ulama, dilakukan sebagian besar oleh kelompok-kelompok keagamaan, bukan secara pribadi, artinya keterlibatan ulama dalam politik

Indonesia diwadahi dalam organisasi-organisasi sosial keagamaan, di antara organisasi sosial keagamaan yang cukup besar dan berpengaruh di Indonesia adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Organisasi sosial keagamaan bisa digolongkan dalam *civil society* (masyarakat sipil/masyarakat madani). Dalam banyak segi, masyarakat sipil diposisikan sebagai bentuk perlawanan terhadap Negara atau minimal posisi kontrol terhadap Negara (Ahmad Faizin Karimi, 2012, 11-12).

Kontekstualisasinya dengan politik di Indonesia yang melibatkan Muhammadiyah, fakta lain yang dapat dilihat adalah bahwa khusus di Internal Muhammadiyah, terutama kalangan muda Muhammadiyah muncul kritik terhadap pendekatan persyarikatan ini terhadap politik. Di satu sisi pada tataran permukaan Muhammadiyah menyatakan tidak berpolitik praktis, dalam bahasa Din Syamsuddin, *menjaga kedekatan yang sama dengan semua parpol*, namun pada tataran praktis pimpinan dan ulama Muhammadiyah sebagian besar menyarankan agar warganya memilih partai politik tertentu, yakni Partai Amanat Nasional (*Ibid*). Warga Muhammadiyah, seakan “dipaksa” untuk memilih partai tertentu ini, yang dianggap memunculkan hubungan interaksionisme-simbolik yang merugikan. Bahkan lebih jauh lagi kegagalan partai berlambang matahari tersebut dalam mengantarkan Amien Rais pada Pemilu 1999 dan 2004 serta memburuknya sikap kader partai terhadap Muhammadiyah memunculkan gerakan penolakan dari Angkatan Muda Muhammadiyah, seperti pernyataan ketua umum Pemuda Muhammadiyah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Tanwir ke-II Pemuda Muhammadiyah di Makassar tahun 2005, bahwa PAN tidak bisa berfungsi sebagai sarana dalam menampung aspirasi dan kepentingan warga Muhammadiyah secara rasional-

mutualistik (*Ibid*). *Ending* kekecewaan itu melahirkan Partai Matahari Bangsa, meski akhirnya gagal pada Pemilu 2009.

Keenam, penelitian Mukhlis dalam disertasinya tentang *Perilaku Politik Elite Keagamaan dalam Politik Lokal*, menyatakan bahwa garis kebijakan Muhammadiyah tentang sikap politik berbangsa dan bernegara mendasari keragaman politik elite Muhammadiyah. Hal tersebut sesuai khittah perjuangan Muhammadiyah (Haedar Nashir, 2005, 15), yang menegaskan sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan dan tidak dalam politik praktis. Adapun makna di balik perilaku elite Muhammadiyah dalam pemilihan kepala daerah antara lain keinginan memiliki bupati dan wakil bupati yang dapat membawa Banyuwangi lebih baik dengan memilih orang yang mengerti karakter masyarakat Banyuwangi. Perilaku elite politik Muhammadiyah juga memiliki makna sebuah gerakan moral untuk menitikkan kepentingan atas gerakan dakwah Muhammadiyah di Banyuwangi terutama keberlangsungan amal usaha Muhammadiyah baik dalam bidang keagamaan, bidang pendidikan, maupun bidang masyarakat.

Menurut Muchlis, penelitian ini mengungkapkan perilaku politik aktif, pasif, dan kreatif yang dilakukan elite Muhammadiyah dalam Pemilu 2009 mempunyai tujuan yaitu membangun strategi, mengatur distribusi, menciptakan bargaining dan merupakan manuver politik elite. Bentuk keterlibatan tersebut di antaranya seperti terlibat menjadi tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, mengajak warga dan pimpinan Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting untuk mendukung calon, dan berbagai perilaku lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup><http://www.malang-post.com/pendidikan/73247-disertasi-teliti-perilaku-politik-elit-muhammadiyah>.



Ketujuh, penelitian Suwarno tentang *Muhammadiyah, Islam dan Runtuhnya Orde Baru: Studi tentang Perubahan Perilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998* (Suwarno, 2001), yang membahas tentang dinamika Muhammadiyah dan pemerintah Orde Baru serta pengaruh perilaku politik praktis Muhammad Amien Rais terhadap tubuh internal persyarikatan Muhammadiyah. Perilaku politik elite Muhammadiyah Muhammad Amien Rais dalam titik tertentu, membawa Muhammadiyah harus berhadapan secara *versus* dengan pemerintah Orde Baru oleh karena kritik tajam kepada pemerintah saat itu dilakukan disaat Muhammad Amien Rais masih aktif di kepengurusan Muhammadiyah tingkat Pimpinan Pusat. Sisi baik dari tindakan politik praktis itu, terjadi perubahan perilaku politik Muhammadiyah sehingga menimbulkan kelompok-kelompok di dalam tubuh Muhammadiyah itu sendiri, seperti kelompok Muhammadiyah puritan dan kelompok Muhammadiyah berpolitik praktis.

Kedelapan, penelitian Syarifuddin Jurdi tentang *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik: Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru* (Syarifuddin Jurdi, 2004), yang meneliti perilaku politik elite Muhammadiyah secara lokalitas di daerah Nusa Tenggara bagian Timur di era reformasi dan dinamika otonomi daerah yang sedang berkembang di daerah tersebut. Kajian ini juga melihat bagaimana elite politik Muhammadiyah merespon dinamika itu dan mempengaruhi perilaku politik praktis baik itu secara internal dalam tubuh Muhammadiyah maupun secara eksternal khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Seakan menemukan kebebasan

---

baru dalam demokrasi, maka ada semacam *euphoria* politik yang mewarnai perpolitikan di wilayah tersebut.

Kesembilan, penelitian Haedar Nashir, tentang *Dinamika Politik Muhammadiyah* (Haedar Nashir, 2000), yang menelaah pemikiran politik Muhammadiyah dan kemungkinan perkembangannya secara peran serta di masyarakat setempat. Haedar sempat menyinggung soal partai politik seperti Masyumi dan PAN, tetapi Haedar Nashir tidak masuk kepada kajian mendalam soal politik. Meski kajian ini tidak mendalam menjelaskan soal peran Muhammadiyah di wilayah tersebut, tetapi sebagai sebuah kajian, penelitian ini memberikan informasi yang baik perihal kontribusi Muhammadiyah pada kajian kawasan.

Kesepuluh, penelitian Zuly Qodir, Achmad Nurmandi dan M. Nurul Yamin, yang mengeditori karya berjudul *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik sebagai Amal Usaha*, tema ini mengkaji potret kekinian Muhammadiyah, bukan menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik, namun *repositioning* gerakan politik Muhammadiyah di Indonesia sehingga Muhammadiyah dapat benar-benar berkontribusi secara nasional maupun internasional menghadapi berbagai masalah kemungkaran sosial seperti korupsi, kerusakan lingkungan, pembalakan liar, makelar kasus, pencurian uang rakyat dan penggelapan pajak serta lainnya. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari Seminar pra-Muktamar Muhammadiyah memasuki abad ke-2, yang ditulis oleh berbagai tokoh Muhammadiyah sekaligus pakar keilmuan yang memiliki kompetensi di dalam merespon problematika tentang bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap bangsanya (Zuly Qodir dkk, 2015).

Kesebelas, penelitian Abdul Haris dkk, tentang pegeseran perilaku politik NU, temuan yang ada menunjukkan, bahwa ada indikasi beberapa tokoh NU yang berkecenderungan mengalami pergeseran sikap, orientasi dan bahkan perilaku politik. Kalau selama ini pola perilaku politik NU bercorak kultural (*cultural oriented*) dengan fokus gerakan pada pembelaan dan pemberdayaan masyarakat, kini perilaku politik NU kian menampakkan wajahnya yang struktural (*structural oriented*). Mengutip pendapat Ali Maschan Moesa oleh Abdul Haris dkk, menyatakan bahwa pergeseran perilaku politik ini bisa dilihat dari peran politik NU yang independen dan oposan menjadi partisan, dan dari partai politik kerakyatan menjadi politik kekuasaan. Meski pergeseran perilaku politik ini lebih bersifat personal atau komunal dalam NU sendiri bukan secara institusional yang melibatkan organisasi, dalam prakteknya susah dipisahkan antara keduanya. Karena tindakan personal atau kelompok yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU selalu mengusung simbol-simbol keorganisasian NU, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pergeseran perilaku politik dalam penelitian tersebut, juga bisa dilihat dari keterlibatan tokoh-tokoh NU yang secara intens memobilisir massa nahdliyyin guna menopang perolehan suara PKB pada pemilu 1999 sebagaimana amanat hasil rapat pleno PBNU ke-4 tanggal 24 Juli 1998 di Jakarta. Hasil rapat ini berisi seruan agar seluruh warga NU memberikan dukungan dan memelihara PKB sebagai satu-satunya partai milik warga NU.<sup>3</sup> Aksi tokoh-tokoh NU dengan segenap warga Nahdliyyin dalam melakukan keberpihakan terhadap Abdurrahman Wahid yang menduduki kursi kepresidenan ketika terjadi konfrontasi dengan

---

<sup>3</sup>[http://www.averroes.or.id/pergeseran-perilaku-politik-kultural-nahdlatul-  
ulama-nu-di-era-multi-partai-pasca-orde-baru-2.html](http://www.averroes.or.id/pergeseran-perilaku-politik-kultural-nahdlatul-<br/>ulama-nu-di-era-multi-partai-pasca-orde-baru-2.html).

MPR/DPR juga mengindikasikan pergeseran ini. Hal ini ditambah dengan pernyataan sikap para ulama NU yang mendukung Abdurrahman Wahid untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 23 Juli 2001 sebagai *political counter* terhadap maklumat MPR/DPR yang hendak mencabut mandat kepresidenan Abdurrahman Wahid melalui Sidang Istimewa (SI) MPR. Semua tindakan yang dilakukan NU tersebut, jelas tidak muncul begitu saja tanpa memiliki pretensi politik( *Ibid*).

Memahami persoalan di atas, ada ambivalensi perilaku politik berkaitan dengan perilaku politik elite NU. NU memutuskan, bahwa keputusan pasca khittah, NU kembali kepada gerakan sosial keagamaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat sipil, agar memiliki energi kuat di dalam merespon pemerintahan yang ada. Namun, sisi lain menunjukkan, bahwa secara politik, lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dibidani oleh NU itu sendiri. Bahkan ada semacam “rekomendasi” beberapa kyai agar khusus warga NU mengarahkan hak politiknya pada PKB. Inilah ambivalensi yang cukup rumit untuk diurai.

Studi budaya politik dalam ilmu politik diawali dengan munculnya pendekatan baru, yakni pendekatan tingkah laku (*behavioural approach*). Embrio pendekatan ini telah ada menjelang perang dunia kedua dan makin menguat pada tahun-tahun 1960-an. Pendekatan ini mengganti unit analisis ilmu politik dari yang berorientasi lembaga-lembaga formal dan juga dalam batas tertentu lembaga informal, menjadi individu atau aktor. Asumsi dasarnya ialah bahwa individu atau aktor politik adalah elemen yang sesungguhnya menentukan kondisi atau kualitas kehidupan politik, daripada lembaga-lembaga politik. Dalam sebuah Negara yang memiliki lembaga-lembaga politik yang sama saja dapat

menghasilkan situasi dan produk politik yang berbeda karena perilaku aktor politiknya berbeda.

Mengingat bahwa unit analisis dalam pendekatan tingkah laku adalah individu, pendekatan ini menyadari bahwa hal yang menentukan perilaku politik individu demikian kompleks, seperti status sosial, ekonomi, budaya atau tingkat pendidikan individu tersebut. Kesadaran ini membangkitkan perhatian pada sebuah cara pandang yang lebih multidisipliner sehingga muncullah kemudian kajian-kajian turunan yang demikian penting, seperti ekonomi politik, psikologi politik, sosiologi politik, termasuk pula budaya politik. Bahkan kemudian, pendekatan tingkah laku tidak ragu menggunakan ilmu statistik dalam memotret perilaku politik masyarakat. Terkait dengan hal ini, pembahasan tentang politik aliran memiliki keterkaitan dan tidak dapat dilepaskan dari keyakinan dan tingkah laku politik yang dibentuk oleh latar belakang keyakinan ideologi maupun landasan primordial tertentu. Pandangan ini kerap melihat sektarianisme sebagai sesuatu yang *given* dan terkait dengan persoalan hegemonik, yakni sesuatu yang mempengaruhi alam bawah sadar dan pada gilirannya turut menentukan preferensi politik (*Ibid*).

Kedua belas, penelitian Syamsul Hidayat yang mengkaji *Pemikiran Muhammadiyah tentang Pluralitas Budaya*. Muhammadiyah memandang pluralitas budaya sebagai keniscayaan *sunatullah*. Artinya budaya dan peradaban adalah rangkaian pandangan hidup, nilai, norma perilaku dan karya manusia yang memiliki keyakinan, kepercayaan dan agama. Muhammadiyah bersikap terbuka dan “cair” di dalam melihat fenomena perubahan dan pluralitas. Inilah perpaduan dari purifikasi dan dinamisasi yang melembaga sebagai sebuah ideologi

atau teologi, yang dikenal di Muhammadiyah sebagai teologi tajdid, yang selama ini telah menjadi pijakan Muhammadiyah dalam memahami, menafsirkan dan menyikapi pluralitas (Syamsul Hidayat, 2010).

Ketiga belas penelitian Ridho al-Hamdi tentang *Dinamika Islam dan Politik Elite-elite Muhammadiyah Periode 1998-2010*. Mengkaji tentang politik elite Muhammadiyah sebagai representasi kaum modernis dalam merespon dinamika Islam dan politik pasca Orde Baru. Ada tiga isu yang dijadikan basis analisis, yaitu munculnya partai-partai Islam, keinginan untuk pengembalian Paiagam Jakarta sebagai azas Negara, dan munculnya terorisme yang selalu dilekatkan sebagai jihad. Penelitian menghasilkan empat varian perilaku kaum modernis. Pertama, sikap transformatif-idealistik, kedua, sikap moderat-idealistik, ketiga sikap realistik-kritis, keempat sikap akomodatif-pragmatis (Ridho al-Hamdi, 2012).

Penting untuk diketahui, bahwa lazimnya sebuah penelitian perlu memahami persamaan atau perbedaannya agar diketahui posisi penelitian di antara penelitian lainnya. Beberapa persamaan penelitian yang telah dilakukan, terletak pada kajian Muhammadiyah dan politik yang menyoroti persoalan dinamika politik, peran politik dan perilaku politik. Adapun perbedaan mendasar di antara penelitian yang telah dilakukan, adalah bergantung pada obyek materi yang dibahas serta lokasi penelitian. Tersebut di bawah ini, beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan Muhammadiyah dan politik. Dengan melihat beberapa model penelitian sejenis, diharapkan dapat diketahui posisi penelitian ini sebenarnya.

Dengan menunjukkan posisi penelitian ini, sesungguhnya telah menunjukkan pula “orisinalitas” penelitian kaitannya dengan perilaku politik dalam kajian politik Islam.

Tabel 1.1  
Urgensi Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tema Penelitian	Urgensi Penelitian	Perbedaan
1	Syarifuddin Jurdi	<i>Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia: Tahun 1966-2006.</i>	Penelitian ini menjelaskan tentang dinamika politik Muhammadiyah terhadap perubahan politik Indonesia, baik itu menyangkut sistem politik, struktur politik dan budaya politik. Penelitian ini menunjukkan varian yang berbeda. Menurut Jurdi, Muhammadiyah berhasil menjaga sikap netralnya terhadap politik tetapi juga berada dalam kooptasi dan hegemoni kekuatan politik.	Perbedaan: fokus kajian tentang sikap politik Muhammadiyah terhadap perpolitikan di tanah air. Sikap, dalam konteks ini adalah perilaku politik yang menjaga “keseimbangan politik sebagai warga Muhammadiyah.

			<p>Sikap netralnya terhadap politik, diterapkan untuk menjaga independensi gerakan serta menghilangkan kesan telah terkooptasi oleh partai politik. Namun dalam perkembangannya, sikap netral politik dalam sistem otoriter Orde Baru tidak sepenuhnya dapat diterapkan, mengingat dominasinya elite-elite Muhammadiyah yang bekerja sebagai PNS di bawah kooptasi dan hegemoni rejim Orde Baru, secara <i>de facto</i> berafiliasi ke Golkar, kekuatan politik rejim berkuasa saat itu.</p>	
2	Mukhlis	<i>Perilaku</i>	Penelitian ini	Perbedaan:



		<i>Politik Elite Keagamaan dalam Politik Lokal</i>	mengungkapkan perilaku politik aktif, pasif, dan kreatif yang dilakukan elite Muhammadiyah dalam Pilkada mempunyai tujuan yaitu membangun strategi, mengatur distribusi, menciptakan <i>bargaining</i> dan merupakan manuver politik elite. Bentuk keterlibatan tersebut di antaranya seperti terlibat menjadi tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, mengajak warga dan pimpinan Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting untuk mendukung calon, dan berbagai perilaku lainnya.	penelitian ini pada persoalan perilaku politik Muhammadiyah sebagai perilaku politik lokal yang memfokuskan pada strategi politik guna mendulang kemenangan politik lokal.
3	Alfian	<i>Muhammadiyah</i>	Pembaharuan	Perbedaan:

		<p><i>ah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism</i></p>	<p>keislaman Muhammadiyah memberikan kontribusi besar bagi perilaku politik Islam di Indonesia. Pemahaman agama yang berikhtiar membebaskan masyarakat dari <i>taqlid</i> buta dan terbelenggu kepada mazhab tertentu telah membawa Muhammadiyah sebagai gerakan yang rasional-religius dalam membangun ideologi politik Islam di Indonesia. Implikasi tersebut dapat dilihat dalam gerakan sosial, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini berhasil memetakan tiga</p>	<p>Penjelasan soal tiga komponen sebagai hasil kajian, khususnya antara <i>religious reformist</i> dan <i>a political force</i>. Secara teori ideologi, penelitian ini melihat persoalan tentang semangat reformasi keagamaan dan semangat politik.</p>
--	--	---	--	---

			wajah Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu Islam di Indonesia, yakni sebagai <i>a religious reformist, agent of changes</i> dan <i>a political force</i> .	
4	Syamsul Hidayat	<i>Pemikiran Muhammadiyah tentang Pluralitas Budaya.</i>	Muhammadiyah memandang pluralitas budaya sebagai keniscayaan <i>sunatullah</i> . Artinya budaya dan peradaban adalah rangkaian pandangan hidup, nilai, norma perilaku dan karya manusia yang memiliki keyakinan, kepercayaan dan agama. Muhammadiyah bersikap terbuka dan “cair” di dalam melihat fenomena perubahan dan	Perbedaan: Penjelasan tentang sikap Muhammadiyah terhadap keragaman budaya dalam konteks nilai-nilai di masyarakat. Meski dapat dikatakan bahwa pluralitas yang dimaksud masih terkesan Muhammadiyah <i>h minded</i> .

			pluralitas. Inilah perpaduan dari purifikasi dan dinamisasi yang melembaga sebagai sebuah ideologi atau teologi, yang dikenal di Muhammadiyah sebagai teologi tajdid, yang selama ini telah menjadi pijakan Muhammadiyah dalam memahami, menafsirkan dan menyikapi pluralitas.	
5	David Efendi	<i>Politik Elite Muhammadiyah: Studi tentang Fragmentasi Elite Muhammadiyah</i>	Kajian ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai politik elite Muhammadiyah serta memahami bagaimana implikasinya terhadap dinamika internal organisasi dan	Perbedaan: Menelaah tentang pemetaan soal kelompok Muhammadiyah Puritan dan kelompok Muhammadiyah Politik Praktis. Dua kelompok ini terjadi tarik menarik kuat di dalam ranah

			<p>eksternal politik Indonesia dalam panggung politik di negeri ini, khususnya dalam pentas Pemilu 2009. Kegagalan politik tahun 2004 tidak menjadikan elite Muhammadiyah trauma untuk melakukan manufer dalam Pemilu 2009, meski memunculkan kubu anti politik praktis yang menguat pasca kekalahan Muhammad Amien Rais. Beberapa argumen tentang signifikansi studi ini dilakukan antara lain, <i>pertama</i>, mengenai optimisme kelompok <i>civil society</i> untuk membangun</p>	<p>persyarikatan dalam perpolitikan.</p>
--	--	--	---	--

			<p>demokrasi.</p> <p>Seperti NU dan Muhammadiyah selalu kandas, dalam mengusung kandidat dalam kontes pemilu langsung, untuk membentuk rezim yang 'lebih baik'.</p> <p><i>Kedua</i>, dalam arena politik Pemilu 2009, kuat fragmentasi itu terlihat di tubuh elite baik antar elite Muhammadiyah lama versus baru pasca Muktamar 2005, atau antara elite yang mengklaim Muhammadiyah murni, ideologis, puritan, versus Muhammadiyah yang pro politik praktis atau <i>high politic</i>, dengan berbagai penafsiran yang melegitimasi tindakan para</p>	
--	--	--	---	--

			elite.	
6	Suwarno	<i>Muhammadiyah, Islam dan Runtuhnya Orde Baru: Studi tentang Perubahan Perilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998.</i>	Muhammad Amien Rais sangat mempengaruhi perubahan politik di tubuh internal Muhammadiyah. Selain kritis kepada pemerintah, juga sempat membawa Muhammadiyah versus pemerintah sangat tajam, sehingga sepak terjang politik praktis Muhammad Amien Rais mempengaruhi pandangan pemerintah terhadap Muhammadiyah. Meski demikian, Muhammad Amien Rais dianggap salah seorang kader Muhammadiyah yang berhasil membangun peradaban politik	Yang membedakannya pada telaah tentang situasional perubahan politik dan peta politik khususnya pengaruh Muhammad Amien Rais melakukan maneuver politik praktis yang beridentitasnya

			di tubuh Muhammadiyah.	
7	Syarifuddin Jurdi	<i>Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik: Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru</i>	Menelaah tentang perilaku politik praktis elite Muhammadiyah di dalam merespon dinamika politik otonomi daerah, era reformasi dan gairah baru dalam kebebasan demokrasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ada perubahan perilaku politik elite, usai runtuhnya Orde Baru sehingga sempat membuat <i>euphoria</i> politik yang membawa pengaruh perilaku politik di internal Muhammadiyah dan daerah Nusa Tenggara Timur.	Perbedaan: Menjelaskan dinamika politik yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur sebelum era reformasi, serta prediksinya pada pemilihan umum yang akan datang.
8	Haedar Nashir	<i>Dinamika Politik</i>	Penelitian Haedar Nashir	Perbedaan: Kajian ini



		<i>Muhammadiyah</i>	mendiskusikan soal peran Muhammadiyah khusus pemikiran politik Muhammadiyah dan perkembangannya . Di samping itu juga menyinggung soal hubungan Muhammadiyah dan partai politik.	tidak melihat secara khusus peran Muhammadiyah dalam perpolitikan serta dinamika politik di Indonesia meskipun bicara soal partai politik seperti Masyumi, PAN dan lainnya. Tetapi kajian ini melihat secara komprehensif peran Muhammadiyah di dalam perpolitikan yang terjadi.
9	Zuly Qodir, Achmad Nurmandi, M. Nurul Yamin (eds.)	<i>Ijtihad Politik Muhammadiyah: Sebagai Amal Usaha</i>	Tema ini mengkaji potret kekinian Muhammadiyah, bukan menjadikan Muhammadiyah sebagai partai	Perbedaan: Layaknya sebuah karya yang lahir dari berbagai kumpulan tulisan, tentu bukan persoalan

			<p>politik, namun <i>repositioning</i> gerakan politik Muhammadiyah di Indonesia sehingga Muhammadiyah dapat benar-benar berkontribusi secara nasional maupun internasional menghadapi berbagai masalah kemungkar sosial seperti korupsi, kerusakan lingkungan, pembalakan liar, makelar kasus, pencurian uang rakyat dan penggelapan pajak serta lainnya. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari</p>	<p>mudah “menyatukan” pokok pikiran dari berbagai penulis menjadi sebuah tulisan yang utuh. Karya ini sebenarnya di pengantari secara baik dan komprehensif oleh para editornya, tetapi ketika memasuki tahapan tiap kajian oleh para penulis yang berbeda, ada beberapa kajian yang tidak komprehensif, hal itu disebabkan oleh minat dan tema yang dikajia oleh masing-masing penulis/</p>
--	--	--	---	--

			Seminar pra-Muktamar Muhammadiyah memasuki abad ke-2, yang ditulis oleh berbagai tokoh Muhammadiyah sekaligus pakar keilmuan yang memiliki kompetensi di dalam merespon problematika tentang bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap bangsanya.	narasumber.
10	Abdul Haris dkk,	<i>Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru: Studi Kasus NU Jember, Jawa Timur.</i>	Temuan yang ada menunjukkan, bahwa ada indikasi beberapa tokoh NU yang berkecenderungan mengalami pergeseran sikap, orientasi dan bahkan perilaku politik. Kalau selama ini pola perilaku politik	Perbedaan: Tulisan ini mengkaji perilaku politik kultural di lingkungan NU, dan kurang komprehensif di dalam menjelaskan dinamika

			<p>NU bercorak kultural (<i>cultural oriented</i>) dengan fokus gerakan pada pembelaan dan pemberdayaan masyarakat, kini perilaku politik NU kian menampakkan wajahnya yang struktural (<i>structural oriented</i>). Pergeseran perilaku politik ini bisa dilihat dari peran politik NU yang independen dan oposan menjadi partisan, dan dari partai politik kerakyatan menjadi politik kekuasaan. Meski pergeseran perilaku politik ini lebih bersifat personal atau komunal dalam NU sendiri bukan secara</p>	<p>politik kultural NU, sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis cenderung datar dan tidak mendalam. Selain itu, subyek kajian peneliti pada Muhammadiyah, bukan NU.</p>
--	--	--	---	---

			<p>institusional yang melibatkan organisasi, dalam prakteknya susah dipisahkan antara keduanya. Karena tindakan personal atau kelompok yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU selalu mengusung simbol-simbol keorganisasian NU, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>	
11	Ridho al-Hamdi	<i>Dinamika Islam dan Politik Elite-elite Muhammadiyah Periode 1998-2010</i>	<p>Mengkaji tentang politik elite Muhammadiyah sebagai representasi kaum modernis dalam merespon dinamika Islam dan politik pasca Orde Baru. Ada tiga isu yang dijadikan basis analisis, yaitu munculnya partai-partai Islam, keinginan untuk pengembalian</p>	<p>Kajian ini menyoroti persoalan Muhammadiyah di tengah kumparan politik, dan sebutannya sebagai kaum modernis yang merespon persoalan-persoalan politik, sehingga dapat diketahui sikap politik dalam</p>

			Paiagam Jakarta sebagai azas Negara, dan munculnya terorisme yang selalu dilekatkan sebagai jihad. Penelitian menghasilkan empat varian perilaku kaum modernis. Pertama, sikap transformatif-idealistik, kedua, sikap moderat-idealistik, ketiga sikap realistik-kritis, keempat sikap akomodatif-pragmatis	tubuh Muhammadiyah.
--	--	--	---	---------------------

### 1.6 Kajian Teoritik

Sebagian besar perilaku manusia merupakan serangkaian instink agar manusia bisa bertahan hidup. Pandangan lain yang dikemukakan oleh seorang analis sosial William James, bahwa instink bukanlah sumber perilaku sosial manusia semata, tetapi pada proses pengulangan sepanjang kehidupan seseorang, atau kebiasaan (*habit*). John Dewey menyatakan, bahwa perilaku manusia tidak sekedar muncul berdasarkan pengalaman masa lampau, tetapi juga secara terus-menerus berubah atau diubah oleh lingkungan, termasuk tentunya orang lain (Hasan Mustafa, 2011).

Itulah pandangan perilaku manusia secara umum yang dikutip dan dikemukakan ulang oleh Hasan Mustofa.

Kontekstualisasinya dengan perilaku politik seseorang atau kelompok tertentu tidak sekadar dibatasi oleh beberapa pandangan khususnya kaum psikolog sebagaimana telah dipaparkan di atas. Melainkan lebih luas lagi pandangan, pemaknaan dan “sesuatu” dibalik itu semua.

Perilaku politik dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengalokasikan sejumlah nilai yang bersifat mengikat (*otoritative*) bagi suatu kelompok ataupun masyarakat, tindakan tersebut bermakna pada usaha untuk membangun kesadaran kolektif. Perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-budaya semacam norma atau nilai yang kemudian mempengaruhi motivasi untuk membentuk sikap dan mendorong tindakan sebagai suatu perilaku politik. Perilaku politik bukanlah kegiatan tunggal, ia terkait berbagai faktor lainnya yang ikut mempengaruhi perilaku politik seseorang atau sekelompok orang. Perilaku elite politik dapat dicermati dengan dua model analisis: 1) model Geertz yang melihat pola perilaku politik dengan orientasi sosio-religius santri dan abangan, dan 2) model Jackson yang melihat faktor pola hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam perilaku politik khususnya dalam gerakan Darul Islam (Syarifuddin Jurdi, 2006). Penelitian ini menggunakan teori elite dan teori pilihan rasional. Berikut penjelasannya.

#### 1.6.1 Teori Elite

Diskursus tentang elite politik, berkaitan dengan perilaku politik aktor dalam masyarakat politik. Teori elite dibangun di atas pandangan atau anggapan bahwa keberadaan elite,

lebih-lebih elite politik, tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks (David Jary and Julia Jary, 1991, 188-189). Struktur perilaku sosial atau tindakan sosial yang dikaji sosiologi dalam hubungan dengan studi tentang elite terkait dengan struktur kepribadian, struktur sosial, dan struktur kebudayaan yang melingkupi kehidupan para elite tersebut. Secara khusus studi sosiologi tentang elite menjadi bagian dari wilayah kajian (*main areas*) sosiologi politik, terutama menyangkut *the study of political elites and masses*. Kajian sosiologi politik, teori elite dikembangkan dalam kaitan meraih posisi politik untuk memastikan posisi utama dalam persaingan kekuasaan. Perilaku politik sebagai tindakan sosial menyangkut pembicaraan tentang bagaimana elite politik itu melakukan maneuver politiknya di dalam menuju kekuasaan, sebagai tindakan yang memiliki makna subyektif.

Menurut kajian David Efendi, bahwa para ilmuwan yang mengkaji dan menteorisasikan konsep elite di antaranya seperti Pareto, Mosca, Michels, dan Darso yang mengatakan bahwa dimana dan kapan saja dalam masyarakat selalu dipimpin oleh sekelompok individu kecil yang berkuasa. Pareto memahami elite lebih pada kekuasaan politik atau kelompok yang memerintah dan elite yang tidak memerintah dengan kedudukan atau jabatan puncak dalam masyarakat, sedangkan Suzanna Keller lebih melihat tingkat pengaruh dan dampak yang diakibatkan oleh elite sehingga mereka bisa bertahan (David Efendi, 2014, 12).

Menurut Soerjono Soekanto membatasi pengertian elite sebagai “kelompok orang-orang yang dalam situasi sosial



tertentu menduduki posisi tertinggi, dianggap mempunyai kekuasaan besar dan hak istimewa, kadang-kadang diartikan sebagai golongan aristokrat yang berkuasa yang berkuasa karena faktor keturunan. Sering kali juga diartikan sebagai posisi-posisi dalam struktur sosial yang relatif tinggi, sehingga mereka yang menduduki posisi tersebut juga mempunyai kedudukan yang tinggi”. Elite digambarkan sebagai kelompok yang terbatas dan memiliki peran di level atas dalam suatu organisasi tertentu. Menurut Haryanto, bahwa elite itu senantiasa merujuk pada seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan tertentu di mana dengan keunggulan tersebut yang bersangkutan dapat menjalankan peran yang berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu (Haryanto, 1990, 6-7). Dengan demikian, maka yang dimaksudkan dengan elite ialah posisi pada puncak struktur-struktur sosial di masyarakat seperti dalam pemerintahan, kemiliteran, ekonomi, agama, pendidikan dan pekerjaan-pekerjaan lain yang masing-masing memiliki kebebasan di dalam membangun hubungan antar keduanya.

#### 1.6.2 Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Perilaku memilih dalam aktifitas politik dapat dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Memilih adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan

aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung (Ramlan Surbakti, 1992, 15-16).

Pada dasarnya, terdapat beberapa faktor dapat dianggap mempengaruhi perilaku pemilih, seperti isu-isu politik, regulasi atau kebijakan politik, pengaruh elite, identifikasi kepartaian atau aliran politik, representatif keyakinan atau kesamaan ideologi agama (David C. Legee dan Lyman A. Kellstedt: 2006; dan Budhy Munawar Rachman: 2010), kelas sosial, ketokohan, termasuk juga loyalitas pada simbol dan figur-figur tertentu.

Teori pilihan rasional menurut James S. Coleman, sebagaimana dikutip oleh Tulus Warsito, adalah tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor di mana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tindakan pilihan actor (Tulus Warsito, 2017, 87).

Analisis Tulus Warsito menunjukkan, bahwa ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Tindakan rasional

individu, biasanya mengarah pada masalah hubungan makro-mikro atau bagaimana cara gabungan tindakan individu menimbulkan perilaku sistem sosial. Jadi, inti dari teori pilihan rasional bahwa pilihan, keyakinan, dan tindakan memiliki hubungan satu sama lain. Sebuah tindakan akan dikatakan rasional bila tindakan tersebut memiliki hubungan dengan pilihan, keyakinan, yaitu dalam artian bahwa tindakan tersebut dapat dibuktikan sebagai tindakan yang paling dapat memuaskan pilihan si pelaku sesuai dengan keyakinan yang ia miliki dan dibuktikan secara *ex ante* dan bukan secara *ex post* (karena pengetahuan manusia tidak ada yang sempurna, sehingga orang rasional tetap bias melakukan kesalahan secara *ex post* (yaitu ketika dibandingkan dengan hasil nyatanya, biarpun secara *ex ante*, yaitu sebelum dampaknya diketahui, keputusannya sudah rasional).

Keyakinan dapat dikatakan bila sesuai dengan bukti-bukti yang ada, dan untuk membuktikan bahwa sebuah tindakan adalah rasional, harus menunjukkan sebuah deretan di mana tindakan tersebut dipandang sebagai terberi (*given*) tapi segala sesuatu yang lain harus dibenarkan atau dicarikan alasannya (yaitu penjelasan mengapa individu mengambil tindakan sesuatu, mengapa individu memiliki keyakinan tertentu) (*Ibid*).

Pandangan lain yang dapat dipresentasikan di sini, yakni menurut Dan Nimmo dalam buku yang dieditori Jalaluddin Rakhmat, mengatakan bahwa pemberi suara yang rasional pada hakikatnya aksional diri, yaitu sifat yang intrinsik pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut

memutuskan pemberian suara pada kebanyakan warganegara. Orang yang rasional (Jalaluddin Rakhmat, 2000, 148),

1. Selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif.
2. Memilah alternatif-alternatif sehingga masing-masing apakah lebih disukai, sama saja atau lebih rendah bila dibandingkan dengan alternatif yang lain.
3. Menyusun alternatif-alternatif dengan cara yang transitif; jika A lebih disukai daripada B, dan B daripada C, maka A lebih disukai daripada C.
4. Selalu memilih alternatif yang peringkat preferensi paling tinggi,
5. Selalu mengambil putusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama, dan bahwa pemberi suara rasional selalu dapat mengambil keputusan apabila dihadapkan pada alternatif dengan memilah alternatif itu, yang lebih disukai, sama atau lebih rendah dari alternatif yang lain, menyusunnya dan kemudian memilih dari alternatif-alternatif tersebut yang peringkat preferensinya paling tinggi dan selalu mengambil keputusan yang sama apabila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.

Penerapan teori pilihan rasional dalam ilmu politik salah satunya adalah untuk menjelaskan perilaku memilih suatu masyarakat terhadap tokoh atau partai tertentu dalam konteks pemilu. Teori pilihan rasional digunakan untuk menjelaskan perilaku-perilaku pemilih yang secara psikologis memiliki karakteristik. Pilihan rasional ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang,

misalnya faktor isu-isu politik ataupun kandidat (aktor politik).

Pada masyarakat urban dan tingkat pendidikan yang baik, tidak semua pilihan menggunakan prinsip-prinsip rasionalitas di dalam menentukan pilihannya. Contoh kasus tersebut dapat dilihat pada penduduk yang bermukim di negara-negara maju seperti Australia (James Q. Wilson, 1995, 263-264).

Menurut Dennis Kavanaugh, sebagaimana dikutip oleh Ramlan Surbakti, mengatakan bahwa pilihan rasional melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi antara untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada. Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (*self interest*) maupun untuk kepentingan umum (Ramlan Surbakti, 1992, 146). Dalam konteks ini, pemilih tidak pasif, artinya mereka tidak terbelenggu oleh ideologi-ideologi, simbol-simbol, faktor psikologis, melainkan bersifat aktif dan memiliki tindakan bebas memilih dan menentukan pilihannya.

Secara rasional, faktor-faktor situasional berupa isu-isu politik dan kandidat yang dicalonkan memiliki peranan yang penting dalam menentukan dan merubah referensi pilihan politik seorang pemilih karena melalui penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, seorang pemilih akan dibimbing untuk menentukan pilihan politiknya. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara (*Ibid*).

Mengenai perilaku politik Muslim, Syafii Anwar berpendapat bahwa perilaku politik muslim di warnai oleh empat kelompok: 1)kelompok pragmatis yang menunjukkan sikap politik yang lebih suka mengintegrasikan diri dengan kekuasaan atau bahkan masuk dalam struktur kekuasaan dengan meninggalkan label ideologi dan pemikirannya, 2)kelompok akomodatif yang sikap politik yang kompromis terhadap pemerintah sekalipun tidak selalu mengintegrasikan diri dalam kekuasaan, 3)kelompok transformatif yang menunjukkan komitmen pada perubahan yang mendasar tetapi menolak cara-cara radikal atau revolusioner, 4)kelompok prinsipalis yang menghendaki ditegakkannya prinsip-prinsip dasar yang diyakini bersumber dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Empat kelompok di atas saling mengisi dan menguatkan, dengan sistem penggolongan yang bersifat longgar sehingga sulit mengidentifikasi dengan jelas (Syarifuddin Jurdi, 2005; M. Syafii Anwar, 1992).

Secara konseptual, dapat dikatakan bahwa elite politik memiliki beberapa keistimewaan atau keunggulan yang dapat

digunakan dalam mempengaruhi masyarakat. Meski diakui juga, bahwa tidak semua kelompok masyarakat mampu dipengaruhi semuanya, hal itu disebabkan oleh pilihan-pilihan rasional yang ada. Sebagai agen, elite politik akan mampu mempengaruhi melalui ranah politik, kontekstualisasinya dengan penjelasan tersebut, Anthony Giddens tentang konsep Agen pada umumnya merujuk kepada tingkatan mikro, atau *actor* manusia secara individu. Bahwa agen berkaitan dengan kejadian-kejadian yang melibatkan individu sebagai pelaku, dalam artian bahwa individu itu bisa bertindak beda dalam fase apapun dalam suatu aturan tindakan tertentu (Anthony Giddens, 2012). Penting dicatat di sini, bahwa ada keterkaitan antara Agen dan modal sosial. Keterkaitan itu dapat dijelaskan konsep Agen (*actor*) menunjuk pada manusianya sebagai individu. Agen (*actor*) sebagai individu yang mempunyai modal sosial kuat tentu dengan sendirinya memiliki penguatan pada struktur masyarakat sehingga mampu menggerakkan dengan baik potensi-potensi yang ada oleh karena pengaruh sang Agen. Dinamika peran Agen dan modal sosial dalam pertarungan Pilihan Kepala Daerah pada akhirnya akan menjadi “syarat utama” bagi seorang Agen di dalam memainkan peran dirinya sebagai elit yang mampu membangun pengaruh kuat dalam mengarahkan masyarakat mencapai *goal* yang telah direncanakannya. Sudah barang tentu setidaknya ada dua hal mendasar dan prinsipil yang digunakan sebagai isu utamanya, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kontekstualisasinya dengan Giddens, Bourdieu memaknai “modal sosial” sebagai “kekuatan yang spesifik”

berada dalam *ranah (field)* yang mensyaratkan individu memiliki penguatan modal sosial-modal sosial yang spesifik agar mampu membangun kekuatan pengaruh yang mampu bertahan. Menurutnya, dalam ranah intelektual, contohnya, seseorang harus memiliki modal istimewa dan spesifik seperti otoritas, prestise, dan sebagainya untuk dapat menampilkan tindakan yang dihargai dan membuatnya menjadi individu yang berpengaruh. Selain itu, ia juga harus memiliki *habitus* yang memberinya strategi, dan kerangka tingkah laku yang memungkinkan menyesuaikan diri dan beradaptasi secara memadai dengan ranah (*field*) intelektual. Contoh konkretnya, seorang ilmuwan yang memiliki skema intelektual sebagai wujud dari *habitus* yang kaya serta memiliki modal ekonomi dan kultural akan mendapat posisi yang baik dalam bidang akademik sebagai arenanya (Richard Harker dkk, 2009).

Tabel 1.2  
Modalitas Bourdieu (David Efendi, 2014, 60)

Jenis Modal	Cakupan Modal; meliputi
Modal Sosial ( <i>social capital</i> )	1. Jaringan 2. Status dalam masyarakat (pendidikan, agama, dll) 3. Keturunan (bangsawan, penguasa) 4. Kekuatan Pengaruh dalam masyarakat 5. Pengurus organisasi besar dan terhormat.
Modal Politik ( <i>political capital</i> )	1. Jabatan Politik (posisi) 2. Pengalaman mengorganisasi massa 3. Keturunan (bangsawan, penguasa) 4. Kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik 5. Reputasi dan legitimasi.



Modal Ekonomi ( <i>economical capital</i> )	1. Kekayaan (finansial, material) 2. Keturunan (bangsawan, penguasa) 3. Kekuatan Pengaruh dalam masyarakat 4. Kelas Menengah santri 5. Birokrat pemerintahan.
Modal Simbolik (Modal Budaya)	1. Gelar pendidikan (tinggi) 2. Citra dan simbol agama 3. Penghargaan terhadap karya seni/budaya/dakwah kultural.

Mencermati pandangan Giddens, menurut telaah Haedar Nashir, bahwa agen adalah aktor, sedangkan agensi menurut Giddens terdiri atas peristiwa yang di dalamnya individu bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, dan peristiwa itu tidak akan terjadi jika saja individu tidak melakukan intervensi. Agen, menurut Giddens memiliki kemampuan menciptakan perbedaan sosial di dunia sosial. Lebih kuat lagi, agen tidak mungkin ada tanpa kekuasaan; jadi, aktor tidak lagi menjadi agen jika ia kehilangan kapasitas untuk menciptakan perbedaan. Giddens jelas mengakui adanya sejumlah hambatan terhadap aktor, namun tidak berarti bahwa aktor tidak memiliki pilihan dan tidak menciptakan perbedaan. Bagi Giddens, menurut catatan Haedar Nashir, secara logis kekuasaan mendahului subjektivitas karena tindakan melibatkan kekuasaan, atau kemampuan mengubah situasi. Jadi, menurut Haedar Nashir, teori strukturasi Giddens menempatkan kekuasaan pada aktor dan tindakan yang bertolak belakang dengan teori-teori yang cenderung mengabaikan orientasi tersebut dan justru mementingkan niat aktor (fenomenologi) atau struktur eksternal (fungsionalisme struktural).

Menurut teori strukturasi Giddens, sebagaimana dikritisi Haedar Nashir, bahwa hubungan antara agen dan struktur bersifat dualitas, bukan hubungan dualisme. Dalam pandangan Giddens, merupakan sesuatu yang sudah jelas jika dikatakan ada perbedaan antara pelaku (agen, aktor) dan struktur, sebagaimana dikatakan ada keterkaitan antara struktur dan pelaku atau sebaliknya. Persoalannya adalah, apakah perbedaan dan hubungan antara pelaku dan struktur itu bersifat dualisme (tegangan atau pertentangan) atau dualitas (timbang-balik)? Giddens melihatnya sebagai dualitas (*duality*) dan bukan dualisme sebagaimana yang telah menjadi pandangan umum ilmu-ilmu sosial yang mempertentangkan pelaku (agen) versus struktur (Haedar Nashir, 2012). Kontekstualisasinya dengan penelitian ini, tampaknya pilihan Haedar Nashir bahwa antara agen dan struktur merupakan dualitas jauh lebih menarik baik secara akademis maupun implikasinya terhadap ranah politik.

Kontekstualisasinya dengan Pilihan Kepala Daerah kabupaten Temanggung Jawa Tengah, bahwa perilaku politik elite politik Muhammadiyah tentu harus memiliki modal sosial yang tinggi sebagai “alat tukar” di dalam menggerakkan massa sebagai pemilih. Agen, dalam hal ini elite politisi Muhammadiyah relatif besar mampu meraih suara dan kekuatan kelompok di dalam menuju dan mencapai cita-cita bersama apabila mereka dapat mempertemukan dan mengintegrasikan antara individu dan struktur dengan relasi antara habitus dan ranah yang melibatkan modal sosial (termasuk di dalamnya modal ekonomi), serta mudah pula menggerakkan kelompok dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan.

Sebagaimana dipaparkan di atas kaitannya dengan sebuah sistem disposisi-disposisi, yakni skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan yang diperoleh dan bertahan lama, agen-agen individual dalam hal ini kelompok elit mencoba mengembangkan disposisi-disposisi tersebut sebagai tanggapan terhadap kondisi-kondisi obyektif yang dihadapinya. Saiful Mujani, menjelaskan bahwa dalam teori elitis atau revisionis tentang demokrasi yang dikembangkan antara lain oleh Schumpeter (1942), Dahl (1956,1961), Huntington (1975, 1968) dan Lipset (1981) sebagaimana dikutip Saiful Mujani, pada dasarnya klaim bahwa gagasan tentang pemerintahan aktual oleh rakyat dalam teori liberal klasik adalah gagasan yang tidak realistis. Kelompok elitis ini berargumen bahwa demokrasi pada dasarnya merupakan urusan elite politik. Demokrasi merupakan prosedur bagi pertarungan di antara para elite untuk memperebutkan posisi penting dalam pemerintahan. Beberapa teoritikus tentang sifat elitis demokrasi lebih jauh berargumen bahwa masyarakat umum, dibandingkan dengan para elite, tidak mampu berperilaku sebagai demokrat pada situasi politik yang konkret. Para elite lah yang merupakan penjaga sejati nyala api demokrasi (*Ibid*). Masih menurut kelompok elite atau revisionis, bahwa kelompok merekalah yang merupakan unsur terpenting dari pembuatan kebijakan publik. Namun, klaim ini tidak sepenuhnya merendahkan pentingnya partisipasi warga Negara, khususnya di Negara-negara demokrasi baru yang muncul belakangan (*Ibid*).

Demokrasi telah menjadi suatu keniscayaan di dalam mengelola pemerintahan. Demokrasi adalah suatu bentuk

pemerintahan politik kekuasaan pemerintahannya berada di tangan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, setidaknya begitulah Lincoln berpendapat. Sistem demokrasi menegaskan bahwa rakyat memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Sampai saat ini, tidak ada definisi tetap dan pasti soal demokrasi, bahkan Plato pun berseloroh bahwa “pengertian dan definisi demokrasi itu masih di surga, belum sempat diturunkan ke bumi (Bernard Crick, 2002). Demokrasi itu tidak bisa didefinisikan secara permanen, oleh karena demokrasi itu model penerapannya bergantung dari tipologi Negara yang menganut jenis demokrasi itu sendiri. Mengolah dari berbagai teori demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa demokrasi tidak hanya mendiskusikan konteks di mana rakyat membentuk dan menguji pandangan tentang demokrasi tetapi juga harus membicarakan tentang bagaimana mekanisme yang selama ini berjalan sesuaikah atau tidak. Artinya, harus ada “pergeseran paradigma” dari kelembagaan makro politik ke berbagai macam pembahasan dan konteks masyarakat sipil. Menurut Larry Diamond dalam karyanya berjudul *Developing Democracy toward Consolidation*, menjelaskan bahwa konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat, sehingga semua aktor politik baik pada level massa maupun elite politik, meyakini bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat (Larry Diamond, 1999).

Giddens, menjelaskan lebih mendalam kaitannya dengan elite politik, bahwa sekelompok individu yang berada dalam strata sosial yang lebih tinggi daripada lainnya memiliki

pengaruh besar dalam organisasi. Elite dimaksud di sini lebih ditujukan kepada elite politik. Posisi elite ditempatkan pada wilayah yang sungguh bermakna politik, ia memberikan motif atas suatu tindakan kolektif. Elite adalah sekelompok kecil orang dalam masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting (Syarifuddin Jurdi, 2005, 25; Suzanne Keller, 1995, 33).

Menggarisbawahi kutipan di atas, bahwa komposisi intelektual elite adalah kemampuan pada keunggulan pribadinya dibanding lainnya dalam hal ini dunia politik, maka posisi demikian cenderung mendorongnya untuk meraih kekuasaan. Elite politik Muhammadiyah merupakan individu-individu yang memiliki kecakapan secara *leadership* yang meliputi kecakapan intelektual, *attitude*, dan moralitas yang baik serta cerdas melihat persoalan-persoalan yang ada dan bermanfaat membangun pengaruh dalam organisasi sehingga dianggap mampu mewakili secara kolektif di dalam mencapai tujuan bersama. Penting untuk digarisbawahi, bahwa elite Muhammadiyah memiliki otoritas untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan regulasi Negara yang merupakan representasi kepentingan umum. Mereka mampu mengintegrasikan kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi sebuah usulan integratif aspirasi warga di dalam memenuhi kebutuhan mendasarnya. Mereka memiliki otoritas menafsirkan doktrin-doktrin agama yang notabene sebagian besar merupakan acuan kehidupan sosial. Puncak strata sosial sebagai modal sosial yang mereka nikmati bukanlah “gratisan”, melainkan hubungan timbal-balik. Elite bertanggungjawab mengemban kepentingan kolektif masyarakat sebagai penyalur aspirasinya. Meski tak

dipungkiri, bahwa ada sebagian mereka justru mengambil keuntungan besar dari “mandat” ini, yakni mengutamakan kepentingan diri sendiri atas nama warga (Andy Dermawan, 2011).

Talcott Parsons berpendapat, bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Tegasnya, masyarakat itu merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Perilaku politik elite politik yang merupakan akumulasi nilai-nilai di masyarakat maupun organisasi berkecenderungan mengarahkan kepada prinsip dan tujuan bersama secara kolegialitas. Perilaku itu didasarkan pada dorongan kemauan, nilai-nilai atau norma yang disepakati. Kemauan berupa tindakan itu bersifat bebas untuk dipilih sebagai sarana dan tujuan dan dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi yang dikendalikan oleh nilai-nilai atau norma yang menjejentah ke perilaku politisi Muslim. Pada tataran ini, tidak terjadi konflik secara signifikan oleh karena ada semacam “kesepakatan-kesepakatan tak tertulis” tetapi dipegangteguhi bersama.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Penjelasan operasional**

Perilaku manusia merupakan manifestasi dari pengalaman dan interaksi manusia yang mewujudkan dalam

bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku memiliki cakupan internal, yakni persepsi, emosi, dan kecerdasan, kemudian cakupan eksternalnya yakni sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang merupakan lingkungannya. Bagi Hall dan Lindzey, bahwa suatu perilaku tertentu yang didorong oleh motif, akan cenderung berbeda tafsirannya (Hall dan Lindzey, 1993, 41)

Berikutnya, Elite Muhammadiyah dalam penjelasan operasional ini adalah sekumpulan orang atau individu yang sedang atau pernah menjabat dan atau berada di pucuk pimpinan organisasi baik di level Pimpinan Daerah (PDM), Cabang (PCM), dan Ranting Muhammadiyah (PRM), serta tokoh masyarakat setempat yang berwarga Muhammadiyah, termasuk calon bupati yang diusung Muhammadiyah.

Klaster elite Muhammadiyah dalam penelitian ini dibagi menjadi empat: pertama, elite agama, yakni elite Muhammadiyah yang memiliki modal sosial sebagai kyai, ustaz atau tokoh agama baik sebagai individu atau yang memiliki basis jamaah di masyarakat. Kedua, elite pebisnis/pedagang atau profesi, yakni elite Muhammadiyah yang memiliki modal ekonomi sebagai pebisnis atau wirausahawan, serta profesi seperti profesi wartawan. Ketiga, elite birokrat, yakni elite Muhammadiyah yang memiliki pekerjaan sebagai wakil rakyat seperti DPRD, PNS berkarir yang sedang atau pernah menduduki struktural. Keempat, elite politisi, yakni elite Muhammadiyah yang memiliki kedudukan

dan peran sebagai aktivis politik (modal politik) baik itu di PAN, PPP dan partai Nasdem.

Setelah menjelaskan soal klaster elite Muhammadiyah dalam penelitian ini, maka yang menjadi karakteristik elite Muhammadiyah, adalah *pertama*, latar belakang kehidupan elite dalam berbagai aspeknya seperti pendidikan, usia, etnik, pekerjaan, dan lingkungannya. *Kedua*, posisi dan peran sosial elite di dalam Muhammadiyah maupun di luar Persyarikatan. *Ketiga*, menyangkut pola hubungan elite Muhammadiyah dengan elite muslim lain dan elite dalam masyarakat guna menggambarkan mobilitas sosial elite yang berkaitan dengan penelitian ini. Perilaku politik elite Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai elite atau tokoh Muhammadiyah di daerah tersebut.

Perilaku politik elite Muhammadiyah dapat dijelaskan sebagai partisipasi politik dalam pemilu, termasuk tindakan untuk memobilisasi massa guna kepentingan politik tertentu. Kemudian sisi lain yang bias dijelaskan soal hubungan elite Muhammadiyah dengan pihak yang memiliki akses pada keputusan politik, seperti pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik di masyarakat.

#### 1.7.2 Batasan Ruang Lingkup Kajian

Penelitian tentang perilaku politik elite telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan. Baik itu perilaku politik dalam konteks individu, organisasi maupun



masyarakat dalam ranah politik. Khusus yang meneliti tentang perilaku politik elite Muhammadiyah belum ada yang melakukan di wilayah kabupaten Temanggung Jawa Tengah khususnya di wilayah Kauman Temanggung. Penting digarisbawahi, bahwa materi permasalahan politik tiap daerah itu berbeda-beda dan membuahkan kesimpulan yang berbeda pula. Apalagi menyangkut tentang sebuah organisasi keagamaan yang memiliki kader-kader umat atau elite-elite yang tata nilai individu dan organisasinya ikut serta mempengaruhi keputusan politik di mana elite itu berada.

Pembatasan penelitian ini dilakukan dalam rangka memfokuskan kajian agar tidak melebar kepada persoalan-persoalan yang dianggap tidak ada sangkut pautnya dengan kajian ini, meski tema pembicaraannya adalah politik. Pembahasan penelitian ini meliputi, pertama menjelaskan pasang surut perpolitikan di wilayah kabupaten Temanggung bagian dari area perpolitikan Jawa Tengah sebagai sebuah dinamika pergantian pucuk pimpinan kepala daerah tingkat dua. Kemudian tentang perilaku politik elite Muhammadiyah. Kedua, menelaah tentang perolehan suara tertinggi calon bupati dari Muhammadiyah di wilayah Kauman Temanggung. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari keputusan organisasi Muhammadiyah baik itu sikap resmi, pernyataan resmi atau tidak resmi, arsip organisasi yang terdokumen maupun tidak terdokumen, atau terpublikasi atau tidak terpublikasi, tertulis dalam manuskrip-manuskrip resmi, pendapat para tokoh dari

elite Muhammadiyah untuk direkonstruksi dan dikontekstualisasikan dengan situasi dan kondisi di mana Pilihan Kepala Daerah berproses dan berlangsung saat itu. Cara tersebut berguna untuk melihat dan memahami dinamikanya secara utuh sehingga pasang surutnya mampu memberikan suatu gambaran yang dapat diketahui secara holistik dan komprehensif, guna membidik bagaimana perilaku elite Muhammadiyah.

### 1.7.3 Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan model *qualitative research*, yakni hasil temuan-temuannya pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Suzanne Keller, 1997, 11), termasuk di dalamnya nilai-nilai individu dan nilai yang berkembang di masyarakat itu sendiri.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni mengkaji lebih lanjut pasang-surut atau dinamika politik di Temanggung khususnya yang berkaitan dengan proses Pilihan Kepala Daerah Temanggung tahun 2013. Tindakan lapangan itu dilakukan dengan melihat fenomena-fenomena yang tampak guna memastikan mengenai implikasi perilaku politik elite Muhammadiyah terhadap warga masyarakat itu sendiri (Varma, S.P, 1982, 101). Dari sini, diperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap pertanyaan-pertanyaan tak terstruktur yang diajukan dalam penelitian ini. Melalui cara berfikir induktif, yakni berangkat dari hal-hal yang

bersifat khusus berdasar pada temuan-temuan di lapangan menuju kesimpulan umum. Oleh karena itu, konsep dan teori yang terbangun dengan sendirinya berangkat dari temuan-temuan lapangan itu sendiri dan gambaran masyarakat atau individu secara personal menurut mereka sendiri ketika mengungkapkan *word view*-nya (Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, 1992).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi (*observation*), yakni melakukan pengamatan atau pencatatan secara sistematis atas gejala yang tampak (*fenomena*) pada Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Temanggung Jawa Tengah, agar gambaran fenomena-fenomena yang mengemuka dapat diidentifikasi secara jelas dan terpilah-pilah.

Berikutnya dilakukan wawancara (*interview*) terhadap pihak-pihak yang kompeten sebagai *key-informan*, seperti ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah setempat, Ketua Partai Amanat Nasional kabupaten Temanggung, tokoh dan elite Muhammadiyah, simpatisan, dan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, termasuk modal sosial dan situasi sosial seperti tempat, pelaku dan aktifitas yang dilakukan. Hal ini penting agar maksud dan tujuan dari penelitian dapat dimaksimalkan dengan mendapatkan data dan mengurainya secara mendalam.

Tahap berikutnya, akan ditindaklanjuti secara *cross-check* pada data primer yang diperoleh secara

langsung melalui sumber atau *key-informan* melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci dimaksud dalam penelitian ini sebagaimana disebutkan beberapa di antaranya di atas. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, seperti artikel-artikel, manuskrip-manuskrip, dokumen, informasi liputan dari media massa, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu peneliti siapkan melalui *interview guide* agar lebih fokus dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun cara pendokumentasian itu dilakukan dengan menggunakan alat rekam semacam tape recorder, alat-alat peraga dan sumber lain termasuk buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian dimaksud.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi (*fenomenology approach*), yakni menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara dengan sejumlah individu, termasuk juga menjelaskan tentang struktur kesadaran dalam pengalaman seseorang. Pendekatan ini memberikan ruang realitas mengungkap dirinya sendiri. Subyek penelitian menceritakan segala macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena atau peristiwa. Pendekatan ini, bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subyek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa (O. Hasbiansyah, 2008; Lorens Bagus, 2002 dan K. Bertens, 1987).

Penelitian ini juga menggunakan metode survei yang lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif. Survei merupakan penelitian yang mengambil sampel

dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai data primer. Metode survei digunakan untuk mendeskripsikan dinamika politik dan menjelaskan perilaku politik elite Muhammadiyah pada Pemilu Kabupaten Temanggung tahun 2013. Metode ini juga digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadikan calon bupati dari Muhammadiyah yang diusung PAN memperoleh suara tertinggi di Kauman Temanggung.

Lokasi penelitian di wilayah Kauman Temanggung Jawa Tengah. Kauman dibagi menjadi dua wilayah yaitu Kauman Selatan (wilayah di sekitar Masjid Agung Temanggung) dan Kauman Utara (wilayah seberang jalan utara masjid, atau wilayah Suronatan). Pada wilayah Kauman terdapat dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni Kauman Selatan (TPS 4) dan Kauman Utara (TPS 6).

Adapun populasi dan sampelnya, adalah jumlah perolehan orang dari pasangan Anif Punto Utomo dan Budiyo pada pemilihan calon Bupati Temanggung Tahun 2013-2018 di Kauman Temanggung Jawa Tengah. Populasi penelitian ini berjumlah 329 orang dengan rincian 77 orang (TPS 4/Kauman Selatan) dan 205 orang (TPS 6/Kauman Utara).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Adapun

pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti yaitu: *Pertama*, responden tinggal di Kauman Temanggung. *Kedua*, responden terdaftar dalam pemilihan calon Bupati Temanggung Tahun 2013-2018. *Ketiga*, responden memilih Anif Punto Utomo dan Budiyo.

Untuk menentukan jumlah sampel digunakan ukuran sampel Slovin dengan rumus sebagai berikut (Joko Ade Nursiyono: 2015, 152):

$$n = \frac{N}{1 + N\varepsilon^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

$\varepsilon$  : Tingkat kesalahan maksimal yang ditoleransi

Adapun jumlah sampel setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Jumlah Sampel Penelitian

TPS	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)
TPS 6	205	135
TPS 4	77	65
<b>Jumlah</b>	<b>282</b>	<b>200</b>

Sumber : Data Sekunder Diolah 2018.

Berdasarkan tabel di atas jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 200 orang.

Berikutnya, yang menjadi Variabel Penelitian (Purwo Adi Wibowo dkk, 2015):

1. Pendekatan Sosiologis: Faktor Karakter Personal

2. Pendekatan Psikologis: Faktor Kandidat Caleg
3. Pendekatan Psikologis: Faktor Partai Pengusung
4. Pendekatan Psikologis: Faktor Sosial/Lingkungan
5. Pendekatan Rasional: Masa Lalu, Sekarang, dan Mendatang

Sedangkan yang menjadi Indikator Penelitian (*Ibid*):

Tabel 1.4  
Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator Penelitian
Pendekatan Sosiologis : Faktor Karakter Personal	1. Agama Caleg
	2. Asal Daerah Caleg
	3. Jenis Kelamin Caleg
	4. Latar Belakang Pendidikan Caleg
	5. Latar Belakang Profesi Caleg
	6. Umur Caleg
Pendekatan Psikologis : Faktor Kandidat Caleg	1. Caleg Dermawan
	2. Fisik Caleg Menarik (Ganteng/Cantik)
	3. Kejujuran Caleg
	4. Ketokohan Caleg
	5. Caleg Mempunyai Kepedulian Terhadap Masyarakat
	6. Popularitas Caleg
Pendekatan Psikologis : Faktor Partai Pengusung	1. Asal Partai Yang Mencalonkan
	2. Dampak Kampanye
	3. Ideologi/Paham Sesuai Dengan Partai
	4. Kedekatan Dengan Caleg Partai
Pendekatan Psikologis : Faktor Sosial/Lingkungan	1. Ajakan Keluarga
	2. Ajakan Teman/Tetangga
	3. Dukungan dari Tokoh Agama Kepada Caleg/Partai
	4. Dukungan dari Tokoh Masyarakat Kepada Caleg/Partai

Pendekatan Rasional : Masa Lalu, Sekarang dan Mendatang	1. Imbalan Uang
	2. Janji-janji Caleg/Partai
	3. Kemampuan Caleg
	4. Keyakinan Terhadap Kinerja Yang Akan Datang
	5. Visi, Misi, Dan Program Caleg/Partai
	6. Kinerja Caleg/Partai Sebelumnya

Selanjutnya, adalah Perhitungan Sampel Penelitian:

$$n = \frac{N}{1 + N\epsilon^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

$\epsilon$  : Tingkat kesalahan maksimal yang ditoleransi

**TPS 6 (N=205):**

$$n = \frac{N}{1 + N\epsilon^2}$$

$$n = \frac{205}{1 + 205(0,05)^2}$$

$$n = 135,53 \text{ dibulatkan } \mathbf{135}$$

**TPS 4 (N=77):**

$$n = \frac{N}{1 + N\epsilon^2}$$

$$n = \frac{77}{1 + 77(0,05)^2}$$

$$n = 64,57 \text{ dibulatkan } \mathbf{65}$$

#### 1.7.4 Proses Analisa Data Kualitatif

Pada proses analisis data kualitatif, dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis-kualitatif melalui reduksi



(Miles M.B. dan Michael Huberman, 1992), yakni hasil rangkaian dan rangkuman data itu dipilih, dan dipilah-pilah mana data primer dan mana data sekunder, kemudian dicari pola dan tema pokoknya berkaitan dengan perilaku politik elite Muhammadiyah dalam proses perubahan politik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara tertinggi di Kauman oleh calon bupati yang disuung Muhammadiyah. Berikutnya melakukan penyajian data, yakni melihat dan memahami pasang surut perpolitikan di kabupaten Temanggung Jawa Tengah, khususnya yang berkaitan dengan proses perubahan politik. Data itu ditampilkan, diamati, dan dipahami dinamikanya kemudian disajikan. Langkah berikutnya melakukan verifikasi, yakni kesimpulan awal yang bersifat masih sementara dikembangkan jika ditemukan bukti-bukti di lapangan yang kuat guna mendukung kesimpulan. Inilah proses analisa data seara kualitatif, berikutnya sebagai “metode ilmu bantu” lainnya adalah pengumpulan data secara kuantitatif.

Secara kuantitatif, Pengumpulan Datanya sebagai berikut.

Tabel 1.5  
Pengumpulan Data

No.	Data	Alat	Sumber
1.	Primer	Kuesioner	Responden penelitian Kauman Temanggung Jawa Tengah
2.	Sekunder	Dokumen	KPU Kabupaten Temanggung 2013

Pengumpulan data penelitian primer menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner digunakan untuk

mengetahui data karakteristik responden, karakteristik sosial, ekonomi, dan politik responden, faktor-faktor penentu perilaku responden dan tingkat kepentingan faktor penentu perilaku responden.

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat menunjang penelitian seperti data dari KPU Kabupaten Temanggung tahun 2013.

Berikutnya, teknik analisis data (dalam konteks data kuantitatif) yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Data yang sudah terkumpul diproses dengan urutan sebagai berikut: *editing* (penyuntingan), *coding* (penandaan), dan *entry* (penginputan). Data dianalisis menggunakan bantuan software statistika yakni *SPSS (Statistical Package for Social Science)* versi 22.00. Hasil analisis data akan disajikan data berupa teks dan tabel.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan pada bagian ini menjelaskan tentang kronologis pembahasan setiap bab dalam sebuah sistematika kajian yang komprehensif. Kegiatan tersebut dilakukan agar ada kesinambungan masalah dalam pembahasannya, sehingga alur pembahasan dapat dilakukan secara sistematis dan mendalam.

Pada Bab Satu, terdiri dari pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan dasar atau pondasi kajian ini dilakukan. Oleh karena itu, bab ini menjadi ukuran bagaimana

penelitian ini dilakukan. Akhir bab ini ditutup dengan publikasi ilmiah.

Bab Dua mendiskusikan tentang hubungan Muhammadiyah dan Negara, yang terdiri dari sejarah berdirinya persyarikatan Muhammadiyah, Muhammadiyah dan sejarah kemerdekaan, dan Muhammadiyah dan Orde Baru. Bab ini, mencoba membangun paradigma mengenai hubungan Muhammadiyah dan Negara sebagai sebuah kesatuan utuh, bahwa fakta di lapangan menunjukkan Muhammadiyah berkontribusi besar terhadap bangsa ini. Berikutnya tentang Muhammadiyah, dakwah dan politik. Berisikan kajian tentang Muhammadiyah dan konsep amar ma`ruf nahi munkar, Muhammadiyah dan politik dalam konteks dakwah, dan Muhammadiyah, Dakwah dan Politik: Tiga Hakikat dalam Satu jasad. Kajian memadukan tiga hal yakni hubungan Muhammadiyah, politik dan dakwah sebagai suatu kajian yang integratif. Kemudian, kajian tentang Pimpinan Muhammadiyah dan Kebijakan pemilu. Mengkaji tentang dilema Muhammadiyah dalam politik praktis, Indonesia, Muhammadiyah dan era multi partai, Muhammadiyah dan PAN, dinamika dan sikap politik Muhammadiyah, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keterlibatan elite pada politik praktis, dan Muhammadiyah dan Politik: Ambivalensikah?

Bab Tiga, tentang Muhammadiyah dalam Dinamika Politik yang berisi kajian tentang Muhammadiyah dan kontestasi keterlibatan umat Islam dalam Pemilu, Muhammadiyah dalam politik praktis, politik era kemerdekaan, politik era Orde Baru, dan politik era reformasi. Kajian ini melihat keterlibatan Muhammadiyah dari sisi kadernya di dalam memberikan kontribusinya pada negara dan bangsa.

Bab Empat, mengkaji pilkada dan perilaku politik elite di kabupaten Temanggung. Menelaah tentang geografi kabupaten Temanggung, dinamika Pilkada tahun 2013 di kabupaten Temanggung, landasan normatif penyelenggaraan pilkada, dan proses koalisi Partai-partai Kontestan Pilkada.

Bab Lima, menelaah tentang perilaku politik elite Muhammadiyah yang meliputi kajiannya partisipasi politik elite politik Muhammadiyah, *Repositioning* politik elite dalam ranah politik, perbedaan pilihan politik dan kepentingan, resiko perbedaan pilihan politik dan kepentingan dalam Perkembangan dan dinamika elite politik Muhammadiyah. Pada Bab ini, kajian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara tertinggi di Kauman oleh calon bupati yang diusung Muhammadiyah melalui kendaraan politik PAN, dikaji secara runtut.

Ditutup Bab Enam, berisi temuan-temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian.

## **1.9 Publikasi Ilmiah**

Berikut karya publikasi dalam bentuk artikel di Jurnal:

”Etika Politik dalam Kajian Islamic Studies”, dalam *Jurnal Humanika*, volume 18, nomor 1, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2018. Ber-ISSN: 1412-1271, dan E-ISSN: 2579-4248.

”Perilaku Politik dalam Organisasi: Kajian Manajemen”, dalam *Jurnal Manajemen Dakwah*, volume 4, nomor 2, tahun 2018. Ber-ISSN: 1978-807X, dan E-ISSN: 2615-0727.